

Implementasi Program Keluarga Harapan di desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Anisatul Islamiyah,

Isnaini Rodiyah

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September , 2023

Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang di ikuti oleh rasa keselamatan, kesejahteraan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kesejahteraan biasanya berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu cerminan pembangunan Negara, apakah pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya segelintir orang saja. Indonesia Negara Besar dengan jumlah penduduknya banyak, lebih dari 225 juta jiwa, salah satu hambatan Indonesia untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan, membuat Indonesia rentan terhadap masalah ekonomi dan sosial yang berdampak langsung pada kemiskinan.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dimulai pada tahun 2007. oleh pemerintah. Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, khususnya pada masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini mampu meringankan beban biaya RTSM, sedangkan dalam jangka panjang memaksa keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, mengimunisasi anak, hingga memeriksa usia ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program pengentasan kemiskinan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan [3].

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana proses Implementasi Program PKH dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program PKH dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?

Metode

- Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena menggunakan metode kualitatif akan lebih dapat menggali informasi lebih mendalam tentang implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti suatu keadaan ilmiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, dan analisa data bersifat induktif/ kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih memperhatikan nilai generalisasi, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi (gabungan).
- Fokus penelitian berfungsi sebagai pembatas agar penelitian tidak melebar, sehingga tujuan penelitian yang sudah disusun sebelumnya akan dapat di deskripsikan secara mendalam fokus penelitian berperan penting bagi peneliti agar tidak terjebak karena banyaknya data yang ada di lapangan. Menurut Edward III (dalam Subarsono, i2011:90-92) [11] yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun focus penelitian kualitatif di dasarkan pada penelitian terdahulu, observasi lapangan dan kajian literature. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam penelitian ini informan yang dipilih antara lain; Kepala Desa Kedungrejo, Kasi Keuangan Desa Kedungrejo, serta coordinator PKH Desa Kedungrejo. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta studi literatur. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah tipe analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (2014:20) [15] yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Pembahasan

Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

1. Komunikasi , Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah menengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan oleh pemerintah melalui Kementrian Sosial, pada dasarnya program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang paling penting dalam operasional program ini adalah bahwa masyarakat dapat menyekolahkan anak-anaknya serta ibu hamil dan balita dapat memeriksakan kesehatannya sebagaimana tujuan dari program ini. Aspek transmisi merupakan penyampaian informasi secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaksana kebijakan, masyarakat sebagai kelompok sasaran,serta pihak lain yang berkepentingan. Penyampaian informasi dilakukan melalui tahap sosialisasi.
2. Sumberdaya, Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah
 - sumberdaya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidakmencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementer saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut.
 - Adapun Sumber daya Anggaran dibutuhkan untuk memenuhi biaya operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Anggaran menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Apabila anggaran terbatas maka berdampak pada rendahnya disposisi dari para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu diperlukan sistem yang intensif dan akuntabel.

Pembahasan

- Adapun Sumber daya Peralatan Sarana prasarana diperlukan dalam implementasi kebijakan untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan. Sarana yang dimaksud yaitu meliputi gedung, komputer, buku, dan lain-lain. Apabila sarana dan prasarana terbatas maka akan berdampak pada rendahnya motivasi para pelaksana kebijakan sehingga dapat menimbulkan gagalnya implementasi kebijakan.
3. Disposisi, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan PKH di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon selama ini berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sikap petugas khusus PKH dalam penyampaian informasi terkait PKH yang cukup mudah dimengerti oleh masyarakat. Keberhasilan PKH di Kecamatan juga didukung dengan cepat tanggapnya petugas lapangan dalam melakukan pendataan terhadap warga kurang mampu yang layak mendapatkan PKH. Petugas pendataan di lapangan merupakan masyarakat umum yang sebelumnya melalui proses seleksi rekrutmen. Meskipun begitu, jumlah insentif yang diberikan dinilai kurang, hal ini dilihat dari keadaan akses jalan, dan kesulitan komunikasi antara masyarakat dengan pegawai lapangan/pendamping. Namun, terlepas dari kesulitan tersebut, para pendamping dapat menyelesaikan pendataan dengan tepat waktu dan sesuai dengan target yang diberikan.

4.

Pembahasan

4. Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, kadangkala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit pelaksana, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi. SOP (Standar Operating Procedure) Pelaksanaan suatu program membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya.

- Standart Operating Procedures (SOP)

SOP adalah prosedur atau aktivitas rutin yang menjadi ukuran dasar para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut buku panduan PKH, SOP penyaluran Program PKH yaitu :

- a. Koordinasi persiapan pertemuan awal
- b. Distribusi formulir verifikasi
- c. Validasi data
- d. Cetak formulir verifikasi
- e. Pemutakiran data rutin status RSTM
- f. Pemutakiran rutin data verifikasi

Temuan Penting Penelitian

Petugas kurang melakukan pemutakhiran data calon penerima program PKH hal ini dikarenakan petugas masih menggunakan data hasil pendataan BPS dengan data dasar yang diambil dari data daftar penerima SLT kategori Sangat miskin dan data miskin yang ternyata data tersebut sudah tidak akurat

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan kajian perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik khususnya dalam hal studi implementasi kebijakan publik.

2. Secara praktis

- Bagi Pemerintah

Sebagai saran atau masukan bagi Pemerintah Desa setempat dalam implementasi evaluasi pengelolaan penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

- Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan dan tambahan informasi bagi masyarakat mengenai kebijakan publik pengelolaan dana bantuan sosial dari pemerintah .

- Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar mampu mengembangkan cara berpikir secara ilmiah dan sistematis terhadap suatu pemecahan masalah dikaitkan dengan teori evaluasi kebijakan publik.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dan menyandingkan dengan kenyataan di lapangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut, 1) Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menurut teori Edward III yaitu Aspek Transmisi penyampaian informasi secara langsung melalui sosialisasi dan. Aspek kejelasan dalam pelaksanaan program PKH di Desa Kedungrejo adalah dilakukan pertemuan awal, dimulai dengan pengiriman pemberitahuan terpilihnya sebagai RTSM sebagai peserta PKH, yang disertai data RTSM, pernyataan persetujuan memenuhi ketentuan PKH, dan undangan untuk menghadiri pertemuan awal yang dikoordinasikan oleh UPPKH Kecamatan Jabon dengan mengundang petugas Puskesmas dan sekolah di Kecamatan tersebut, hal ini berjalan sesuai dengan prosedur. Aspek Konsistensi Pelaksanaan tidak hanya difokuskan pada sisi legitimasi tetapi juga dari sisi akuntabilitas, yakni terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan manusia serta perangkat ekonomi dan finansial yang dilakukan secara bertanggung jawab, terukur, dan responsif. Pada aspek sumberdaya, telah dipersiapkan dari pusat meliputi sumber daya manusia yaitu pendamping PKH, sumber daya anggaran, Sumber Daya Informasi Dan Kewenangan dan sumber daya peralatan. Pada aspek Disposisi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sikap dan watak aparatur Dinas Sosial, Pendamping PKH dan Peserta PKH secara umum sudah baik. Pada aspek Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Desa Kedungrejo. Kepala Dinas Sosial memberikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial, untuk berkoordinasi dengan Pendamping PKH dalam melaksanakan dan pembinaan kepada Peserta PKH. 2) Faktor pendukung dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo antara lain adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan program keluarga harapan (PKH) guna membantu memutus rantai kemiskinan di tingkat masyarakat miskin dan Adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan program dan adanya jaminan memperoleh kesehatan dan pendidikan yang layak dari pemerintah melalui dinas sosial. Sedangkan faktor penghambat antara lain masih banyak warga yang belum terdata pada program PKH dan petugas kurang melakukan pemutakhiran data calon penerima program PKH.

Referensi

REFERENSI

- [1] Administrator, "Badan Pusat Statistik," Badan Pusat Statistik, 31 Desember 2021. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,53%20persen%20pada%20September%202022..> [Accessed 25 Oktober 2022].
- [2] E. Suharto, Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- [3] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- [4] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
- [5] J. A. Anderson, Public Policy Making: basic Concept in Political Sciences, New York: Praeger University Series , 1975.
- [6] W. Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- [7] B. Winarno, Kebijakan Publik; Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Presindo, 2002.
- [8] Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- [9] L. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- [10] Bodgan and Taylor, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remadja Karya, 1975.
- [11] S. AG., Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- [12] B. Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- [13] Sugiarto, Metodologi Penelitian Bisnis, Yogyakarta: ANDI, 2017.
- [14] M. Miles, A. Huberman and J. Saldajana, Qualitative data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3, USA: Sage Publications, 2014.

